

PENTINGNYA TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK SORONG TIMUR KOTA SORONG

Oleh :

STEVAN SELFANUS AHULUHELW

Dalam perkembangan pelaksanaan pembangunan sekarang ini sebagian memperlihatkan bahwa pelaksanaannya dari pemerintah saja. Pemahaman yang demikian merupakan suatu pandangan yang keliru tentang tujuan pembangunan bagi masyarakat seluruhnya. Tidak heran pula kita melihat beberapa pembangunan yang dilaksanakan mengalami kegagalan serta tidak memenuhi sasaran yang diharapkan. Terlalu besarnya peran pemerintah dalam mengemban tugas serta lemahnya dan tidak profesionalnya kerja pemerintah dalam hal transparansi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat turut menyumbang kegagalan dalam pembangunan. Aparatur pemerintah Distrik Sorong Timur Kota Sorong diharapkan berperan aktif melaksanakan pembangunan ditingkat distrik maupun program-program distrik dalam meningkatkan pembangunan di desa. Pembangunan di Distrik Sorong Timur dilaksanakan dalam jangka panjang, menengah dan pendek, program pembangunan lebih mengutamakan program jangka pendek yang lebih ingin dicapai misalnya peningkatan SDM aparat distrik, karena kemampuan aparatur distrik memiliki peran yang besar dalam memberikan stimulasi bagi masyarakat, untuk itu pemerintah distrik harus mampu mengoptimalkan ketrampilan/keahlian kualitas kerja. Namun dalam realita pelaksanaan pemerintahan Distrik Sorong Timur masih memiliki beberapa kendala-kendala yang dihadapi.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perubahan pandangan yang berorientasi kepada perwujudan nilai transparansi perlu dilakukan sebagai koreksi terhadap kekeliruan masa lalu, yang secara umum ditandai oleh lemahnya visi pemerintah orde baru dalam mengantisipasi dan menghadapi perubahan.

Pada hakekatnya tidak begitu banyak perbedaan antara pemerintah pada periode pertama, kedua dan periode ketiga, karena pada dasarnya semua belum mampu memberikan kesejahteraan meskipun semasa orde baru pembangunan sudah tampak. Faktor yang paling dominan dari keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan adalah ditentukan oleh transparansi pemerintah yang akan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan prinsip imbalan dalam transparansi pemerintah dan prakarsa/partisipasi masyarakat dalam pembangunan, secara serentak telah terjadi interaksi pemerintah

disatu pihak dan masyarakat disatu pihak agar masyarakat dapat bergerak, terdorong atau timbul inisiatif berpartisipasi jika adanya transparansi dari pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program.

Transparansi akan memperkecil terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pemborosan dan kebocoran yang sering dilakukan oleh aparatur- aparatur pemerintah kita. Transparansi harus dapat dibangun atas dasar arus informasi yang perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus dapat dimengerti dan dipantau. Partisipasi masyarakat adalah semua warga Negara mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun atas dasar kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat

serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Berkaitan dengan transparansi tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan UU No 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP). Diharapkan melalui undang-undang ini masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya pembangunan di tingkat Distrik.

Secara operasional pengelolaan pemerintahan dinilai masih sangat rendah diantaranya dari segi administratif dan teknis pemerintah distrik dalam melaksanakan program pembangunan ditingkat Distrik maupun di desa belum optimal. Hal ini pula dipengaruhi oleh berbagai macam kendala, dan yang paling menonjol dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut, khususnya berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan yang dinilai belum cukup optimal ikut serta menyukseskan agenda pembangunan ditingkat distrik maupun di desa. Lemahnya peran pemerintah dalam memberikan pelayanan masyarakat dinilai terkesan tertutup terhadap mekanisme kerja pemerintahan dan pengelolaan program/proyek pembangunan. Masyarakat menjadi lebih apatis atau diam saja terhadap program-program pembangunan yang selama ini menjadi agenda kerja utama pemerintah Distrik Sorong Timur. Hal ini disebabkan oleh Kurangnya Transparansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal inilah yang menjadi penyebab utama masyarakat kurang terdorong dalam memberikan partisipasi dan kontribusi bagi pembangunan di Distrik Sorong Timur maupun program-program pembangunan Distrik Sorong Timur yang dilaksanakan di Desa.

Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2008 pasal 28 mengatur tentang Hubungan kerja Distrik dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja distrik bersifat koordinasi dan fasilitasi. Dalam rangka membangun hubungan kerja yang demikian, maka pemerintah distrik harus transparan dan terbuka terhadap mitra kerjanya tersebut.

Ketidakttransparan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dinilai lebih memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembangunan dari pemerintah saja sehingga timbul pemahaman masyarakat terhadap pandangan yang keliru tentang tujuan pembangunan itu sendiri. Terlalu besarnya peran pemerintah dalam mengemban tugas serta lemah dan tidak profesionalnya kerja pemerintah dalam transparansi menimbulkan satu pandangan yang keliru tentang pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat sehing-

ga beberapa pembangunan yang dilaksanakan mengalami kegagalan serta tidak memenuhi sasaran yang diharapkan. Mekanisme kerja yang tidak memenuhi sasaran mengakibatkan pelaksanaan pembangunan kurang efektif dan efisien serta kurang optimal.

Kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah Distrik Sorong Timur dan masyarakat mengakibatkan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, terlihat dalam beberapa proyek pengerjaan pembangunan seperti jalan, trotoar jalan tidak tercantum papan proyek sehingga menimbulkan pertanyaan dimasyarakat. Masyarakat berharap pemerintah dalam hal pelaksanaan pembangunan tersebut, agar dilibatkan secara keseluruhan baik dalam penetapan maupun pengambilan kebijakan program khususnya di distrik Sorong Timur transparansi pemerintah distrik diharapkan bisa lebih menyeluruh kepada lapisan masyarakat.

Maka dalam konteks permasalahan inilah penulis tertarik mencoba untuk melakukan penelitian mengenai " Pentingnya Transparansi Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan " suatu studi di Distrik Sorong Timur Kota Sorong.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

"Bagaimana pentingnya transparansi Pemerintah Distrik Sorong Timur pada masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Distrik Sorong Timur?"

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

Untuk mengetahui pentingnya transparansi Pemerintah Distrik Sorong Timur pada masyarakat terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di Distrik Sorong Timur Kota Sorong.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Ilmiah, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya jurusan ilmu pemerintah.
- b. Secara Praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah setempat, khususnya mengenai transparansi pemerintahan.
- c. Diharapkan dari hasil ini dapat menjadi bahan

dasar penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun siapa saja yang berminat meneliti masalah transparansi pemerintah pada masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Transparansi

Pemerintah yang baik akan transparan terhadap rakyat baik tingkat pusat maupun daerah dan harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi yang tersedia harus memadai dan dapat dimengerti. Transparansi menurut Vera Jassini Puteri (2005 : 216), pertama transparan informasi yang relevan yang tersedia untuk manfaat public secara umum dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara jelas dan disebar. Transparansi merupakan prasyarat tercapainya akuntabilitas yang menjamin kapasitasnya. Kedua, tersedianya kesediaan yang cukup akurat dan tepat waktu tentang kebijaksanaan publik dan proses pembukaannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak profesional.

Transparansi merupakan salah satu indikator penting karena hal ini menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi tingkat transparansi akan semakin baik. Menurut S.H Sarundajang (2005 : 276), transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan itu, pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan pada masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan jalur komunikasi seperti brosur dan pengumuman media massa. Pemerintah daerah perlu menyediakan kebijakan, kebijakan itu memperjelas informasi yang bersifat rahasia.

B. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan dan pemerintah mempunyai arti sempit dan luas, Pemerintah dalam arti luas adalah segala tugas dan kewenangan negara, yang kalau mengikuti pembidangan menurut Montesquieu, Pemerintah dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit menunjukkan kepada seluruh aparat atau perlengkapan Negara yang menjalankan tugas dan kewenangan dibidang eksekutif saja.

Inu Kencana Syafie (1994 : 11), memberikan pengertian sebagai berikut :

- a. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh
- b. Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan pemerintah
- c. Pemerintah berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Secara Etimologis, kata Pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat himbauan sebagai berikut :

1. Mendapat awalan "pe" menjadi kata "perintah" berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus negara.
2. Mendapat akhiran "an" menjadi kata "pemerintahan" berarti perihal, cara atau perbuatan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Didalam kata dasar "perintah" paling sedikit ada empat (4) unsur penting yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak diperintah yang disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah yang memiliki wewenang dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Hak diperintah memiliki kekuasaan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang memerintah dan diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Menurut Mac Iver dalam Inu Kencana Syafie (2006:6) mengatakan bahwa maksudnya pemerintah itu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai Pemerintah dan Pemerintahan maka perlu dilakukan penghayatan yang lebih mendalam. Dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan "government" yang sering diartikan sebagai "Pemerintah" ataupun "Pemerintahan.

Bayu Suryaningrat (1987:11) istilah "government" yang diturunkan dari kata kerja "to govern" artinya sebagai berikut :

1. Melaksanakan wewenang pemerintahan
2. Cara atau sistem memerintah
3. Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah
4. Wilayah atau Negara yang diperintah
5. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara.

C. Konsep Pembangunan

Pembangunan berasal dari kata bangun,

yang diberi awalan “pe” dan akhiran “an”, guna menunjukkan perihal orang membangun, atau perihal bagaimana pekerjaan membangun itu sendiri. Kata bangun setidak-tidaknya mengandung tiga arti. Bangun dalam arti sadar atau siuman. Kedua, berarti bentuk. Ketiga, bangun berarti kata kerja, membangun berarti mendirikan. Dilihat dari segi ini, konsep pembangunan meliputi ketiga arti tersebut. Konsep ini menunjukkan pembangunan sebagai :

- a. Masukan, yaitu kesaadaran sebagai kondisi mutlak bagi berhasilnya perjuangan bangsa.
- b. Proses, yaitu proses pembangunan atau mendirikan berbagai kebutuhan berdasarkan nasional.
- c. Keluaran, yaitu berbagai bentuk bangun sebagai hasil perjuangan, baik fisik maupun non fisik (Taliziduhu Ndrah, 1986:1-2).

Para ahli banyak menggunakan berbagai istilah dalam mendefinisikan pembangunan. Antara lain dengan menggunakan kata modernisasi, perubahan sosial (Social change), development, pertumbuhan, (growth) dan lain sebagainya.

J. W. Schoorl (dalam Taliziduhu, 1986 : 1-3), mengatakan bahwa istilah pembangunan dalam kaitannya dengan modernisasi adalah penerapan pengetahuan ilmiah yang ada pada semua aktifitas, semua bidang kehidupan atau semua aspek-aspek kehidupan masyarakat.

Menurut I. Nyoman Beratha (1982 : 1-5) bahwa pembangunan itu tidak lain adalah satu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu. Perubahan-perubahan yang direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya inilah yang sekedar bermakna ekonomi dan industrialistis saja. Ada pula yang mengatakan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan yang lainnya dipandang lebih bernilai. Dengan demikian pembangunan adalah proses pembauran yang secara terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif.

Menurut Sugiyono (2002 : 15) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan di analisa secara kualitatif.

2. Fokus Penelitian

Dari pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa transparansi pemerintah pada masyarakat dalam pembangunan memiliki dampak positif bagi peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Sorong maupun yang telah ditetapkan oleh pemerintah Distrik Sorong Timur.

Berangkat dari pemahaman sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini berupaya menjawab permasalahan pokok sebagai berikut :

Bagaimana pentingnya transparansi Pemerintah Distrik Sorong Timur pada masyarakat terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di Distrik?

Berdasarkan permasalahan pokok tersebut maka fokus penelitian ini mencakup:

- a. Partisipasi Masyarakat dalam penetapan program – program Pembangunan
- b. Kejelasan Informasi tentang Pelaksanaan Pembangunan.
- c. Keterbukaan Pemerintah untuk diawasi dalam pelaksanaan Pembangunan

3. Informan

Setiap penelitian berhadapan dengan masalah sumber data yang disebut Informan penelitian. Di dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat disajikan sumber informasi. Dengan penelitian kualitatif informan penelitian dipilih secara “Purposive” berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah : Kepala Distrik, Sekretaris Distrik, Kepala Seksi Pemerintahan dan Masyarakat Distrik Sorong Timur, keseluruhannya berjumlah 12 informan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai Setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumbernya datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan

sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi (Sugiyono, 2007;62-63).

5. Teknis Analisa Data

Menurut Nawawi (1994 : 73), penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut :

- a. Kategorisasi, dalam hal ini data-data yang diperoleh dari lapangan dikategorikan berdasarkan data prioritas yang dianalisa dan data yang tidak diprioritaskan untuk dianalisa.
- b. Reduksi adalah sebuah langkah dengan menghilangkan atau menegaskan data tertentu yang dinilai tidak perlu dianalisa secara lebih lanjut untuk kepentingan peneliti.
- c. Interpretasi adalah tahap akhir dari proses analisa data, dimana memberikan tafsiran, penjelasan-penjelasan yang berkaitan erat dengan data-data yang menjadi isu dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Transparansi Pemerintah Distrik Sorong Timur Dalam Pembangunan

Bentuk-bentuk transparansi pemerintah Distrik Sorong Timur dalam pembangunan diantaranya ini diamati dari dimensi-dimensi pokok berikut :

1. Partisipasi Masyarakat dalam penetapan program – program Pembangunan

Penulis pertama-tama berusaha memperoleh gambaran mengenai tanggapan informan tentang cara atau sikap pemerintah dalam hal ini camat dalam melibatkan masyarakat untuk merumuskan dan menetapkan program-program pembangunan di distrik maupun di kampung.

Sebelum penulis menanyakan mengenai

apakah masyarakat distrik sorong terlibat dalam penetapan program pembangunan, penulis ingin mengetahui mengenai tanggapan informan mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program pembangunan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada seorang kepala kampung di distrik beliau menjelaskan bahwa :

“Keterlibatan masyarakat dalam penetapan program-program pembangunan sangat penting. Mekanisme pembentukan kebijakan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Distrik Sorong Timur, selama ini hanya melalui musyawarah kampung yang rutin dilakukan di kampung-kampung, secara teknis mekanisme tersebut belum optimal, karena transparansi pemerintah Distrik Sorong Timur masih berupa sosialisasi saja, sehingga masyarakat hanya dilibatkan dalam proses pelaksanaan bila program-program pembangunan akan segera direalisasikan ditingkat distrik maupun di kampung. Transparansi yang selama ini dapat kami lihat masih berupa penjabaran program kerja dari pemerintah Kota Sorong”.

Dari data hasil wawancara diatas memberikan penjelasan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penetapan program-program pembangunan sangatlah penting. Dalam hal ini Pemerintah Distrik Sorong Timur harus lebih optimal melibatkan masyarakat. Keterlibatan ini bukan hanya sampai pada mengetahuinya karena adanya sosialisasi pemerintah, tetapi harus dilibatkan lebih jauh lagi, sehingga pembangunan lebih bersifat partisipatif.

Dari hasil penelitian melalui wawancara kepada para informan mengenai keterlibatan masyarakat dalam penetapan program, menunjukkan bahwa selalu melibatkan masyarakat dalam proses perumusan dan penetapan program pembangunan di distrik maupun di desa. Hal ini berdasarkan penuturan dari beberapa informan yakni pernyataan dari salah satu tokoh masyarakat AN sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, beliau menjelaskan bahwa :

“ Pemerintah Distrik Sorong Timur sering melibatkan masyarakat desa dalam penetapan program-program pembangunan ditingkat distrik maupun di kampung. Hal ini sangat dirasakan oleh kami, terutama melalui pelaksanaan rapat yang rutin dilaksanakan. Penetapan program-program pembangunan di distrik dan kampung sangat diterima baik oleh masyarakat kampung, namun dalam penetapan program pembangunan transparansi pemerintah di lingkungan pemerintah Distrik Sorong Timur lebih ditekankan lagi pelaksanaannya, agar bersifat lebih terbuka dan menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat. Se-

hingga kepercayaan masyarakat yang terbangun kepada pemerintah Distrik Sorong Timur terus terjalin dengan baik”

Penulis juga mewawancarai informan dari pihak pemerintah yakni kepala distrik sorong timur mengenai pelibatan masyarakat dalam penetapan program kerja, beliau mengatakan : kami selaku pemerintah dalam hal ini berupaya melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan baik dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaannya, dalam penetapan program kami mengundang masyarakat untuk ikut serta menyumbangkan pikiran, ide dalam pelaksanaan pembangunan di distrik nanti, namun terkadang tidak semua masyarakat yang meresponi bagus niat baik kami ini, meskipun begitu setidaknya kami telah berusaha melibatkan masyarakat.

Beranjak dari data hasil wawancara yang berkaitan dengan bentuk transparansi pemerintah Distrik Sorong Timur dalam hal penetapan program-program pembangunan distrik dan kampung, yang selama ini cukup optimal dilaksanakan.

2. Kejelasan Informasi tentang Pelaksanaan Pembangunan.

Tingkat transparansi pemerintah sangat ditentukan oleh jelasnya informasi menyangkut pelaksanaan program-program pembangunan di kecamatan kepada masyarakat.

Sebelum lanjut lebih jauh, penulis ingin mengetahui tanggapan informan mengenai pentingnya kejelasan informasi tentang pelaksanaan pembangunan dari Hasil wawancara kepada salah satu tokoh agama WA yang ada di Distrik Sorong Timur, beliau menuturkan bahwa “ Kejelasan informasi dari pemerintah sangat penting dalam melaksanakan pembangunan. Kalau pemerintah memberikan informasi yang jelas maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. Kalau informasinya tidak jelas atau bahkan pemerintah tertutup dalam hal ini, maka akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Kecurigaan masyarakat ini dapat menghambat pelaksanaan pembangunan tersebut.”

Dari hasil wawancara di atas dan beberapa masyarakat yang penulis mintai pendapat dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan sangat penting. Kejelasan informasi ini dapat mendorong kualitas penyelenggaraan pembangunan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara kepada para informan tentang kejelasan informasi dalam program pembangunan di distrik sorong timur, bahwa pemerintah kurang jelas dalam

memberikan informasi menyangkut pelaksanaan pembangunan di distrik,

Hal ini berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang tokoh adat di distrik sorong timur, dengan inisial KU yang berdomisili di Distrik Sorong Timur. Beliau menuturkan bahwa, “pemerintah distrik tidak pernah memberikan informasi yang jelas tentang proyek-proyek yang dilaksanakan di Distrik Sorong Timur. Kami masyarakat sering hanya tahu ketika proyek sudah berjalan. Mungkin pemerintah distrik takut kalau proyek ini diketahui maka masyarakat akan mengawasinya secara ketat.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan belum dapat melaksanakan transparansi melalui pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Pembangunan di Distrik Sorong Timur.

3. Keterbukaan Pemerintah untuk diawasi dalam pelaksanaan Pembangunan

Tingkat transparansi pemerintah sangat ditentukan oleh keterbukaan Pemerintah untuk diawasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan di kecamatan. Sebelumnya penulis meneliti mengenai pentingnya keterbukaan pemerintah untuk diawasi dalam pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat. Hasil wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat BG yang ada di Distrik Sorong Timur, beliau menuturkan bahwa “Keterbukaan pemerintah terhadap pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan. Kalau hal ini tidak dilakukan maka bisa saja terjadi korupsi, kolusi maupun nepotisme. Kalau pemerintah terbuka dan menerima untuk diawasi, masyarakat akan sangat mendukung pelaksanaan pembangunan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan pemerintah terhadap pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan sangat penting. Keterbukaan ini dapat meminimalisasi teradinya Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara informan tentang keterbukaan Pemerintah untuk diawasi dalam program pembangunan distrik dapat digambarkan sebagai berikut :

Dari hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat dengan inisial AP yang berdomisili di Distrik Sorong Timur. Beliau menuturkan bahwa “Memang dengan gencarnya dilakukan pemeriksaan baik secara internal maupun oleh lembaga lainnya, pemerintah terkesan takut untuk tertutup. Selain itu sekarang sudah ada Undang-undang yang melarang pemerintah untuk tertutup kepada masyarakat,

apalagi menyangkut kepentingan publik secara umum.”

Hal senada juga dikatakan oleh seorang informan masyarakat Ibu. GK beliau mengatakan : pemerintah distrik kelihatannya terbuka untuk diawasi dalam pelaksanaan pembangunan, dalam beberapa kesempatan camat menyampaikan bahwa pemerintah terbuka menerima kritik dan saran serta pertanyaan dari masyarakat yang ingin mengetahui proses pelaksanaan pembangunan di distrik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan sudah melaksanakan transparansi melalui keterbukaan terhadap pengawasan internal maupun kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Pembangunan di Distrik Sorong Timur.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil analisis data dan pembahasannya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk transparansi Pemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan yaitu Partisipasi masyarakat dalam pembuatan program pembangunan, kejelasan informasi tentang pelaksanaan pembangunan, serta keterbukaan pemerintah untuk diawasi dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam hal penetapan program-program pembangunan distrik, selama ini cukup optimal dilaksanakan. Namun dalam hal pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan menjadi lebih baik. Pemerintah sudah cukup baik dalam hal melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan di distrik. Pemerintah Distrik Sorong Timur dalam hal ini melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terkait. Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dalam rangka kesuksesan pelaksanaan pembangunan
3. Pemerintah distrik belum dapat melaksanakan transparansi melalui pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Pembangunan di Distrik Sorong Timur, hal ini tergambar dari masih simpang siurnya informasi tentang proyek-proyek pembangunan di Distrik Sorong Timur.
4. Kejelasan informasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan sangat penting. Kejelasan informasi ini dapat mendorong kualitas penyelenggaraan pemban-

gunan

5. Pemerintah distrik sudah melaksanakan transparansi melalui keterbukaan terhadap pengawasan internal maupun kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Pembangunan di Distrik Sorong Timur
6. Keterbukaan pemerintah terhadap pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan sangat penting. Keterbukaan ini dapat meminimalisasi teradinya Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme dalam penyelenggaraan pembangunan

B. SARAN

Bertitik tolak dari hasil-hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, untuk lebih meningkatkan transparansi pemerintahan pada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, maka dipandang untuk memberikan saran sebagai implikasi penting bagi pihak-pihak terkait untuk menindak lanjutinya. Saran yang dimaksud sebagai berikut :

1. Melihat masih rendahnya frekuensi transparansi pemerintahan di Distrik Sorong Timur maka perlu adanya peningkatan dari pemerintahan distrik untuk lebih menindaklanjuti dalam melaksanakan program-program pembangunan.
2. Pemerintah Distrik Sorong Timur harus terus bersikap demokratis baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi program pembangunan. Oleh karena itu pemerintah distrik harus berupaya meningkatkan frekuensi keterlibatan masyarakat baik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan program-program pembangunan yang telah ditetapkan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
3. Masyarakat lebih meningkatkan keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan maupun dalam penetapan program-program pembangunan baik di tingkat distrik maupun di kampung,

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Suryaningrat, Mengenal Ilmu Pemerintah. Jakarta Rineka Cipta, 1987.
- I. Nyoman Beratha, 1982. Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Ghalia Indonesia.
- Putri Jasini Vera, 2005. Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah. Edisi Ketiga Semeru, Jakarta.
- Sarundajang, S.H 2005., Babak Baru Sistem Pemer-

- intahan Indonesia, Jakarta : Kata Hasta Pustaka.
- Sudjana, Nana, H, DR. 1992., Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Jakarta : Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono, Prof.Dr. 2007, Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta; Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 1994. Etika Pemerintah. UPP AMPP TKPN < Yogyakarta.
- Saparin, Sumber, 1986. Tata Pemerintahan Desa dn Administrasi Pemerintahan Desa. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Talizuduhu Ndraha, 1987. Cara Menggerakkn Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Yayasan Karya Dharma, Jakarta.
- Talizuduhu, Ndraha, 1986, Peranan administrasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa, IIP : Jakarta.
- Sumber – Sumber Lainnya :
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.